

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Erna Enjelina Silalahi^{1*}, Rolens Riwu Manu², & Ari Data³

¹²³Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Nusa Cendana

*e-mail: silalahiernaenjelina@gmail.com

Abstrak: Tujuan riset ini adalah guna mengetahui seberapa besar sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan memengaruhi kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode riset ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. 95 pegawai menjadi populasi dan sampel penelitian ini melibatkan 68 pegawai dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan memakai kusioner. Riset ini menganalisis data dengan menggunakan regresi linear berganda dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji parsial telah diperoleh T hitung yang didapat lebih besar dari nilai T tabel ($X_1=2,639 > 1,996$, $X_2= 2,243 > 1,996$), dengan demikian diketahui bahwa baik sistem pengendalian intern pemerintah maupun aksesibilitas laporan keuangan memengaruhi secara sendiri-sendiri terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya nilai F hitung pada uji simultan lebih besar dari nilai F tabel ($5,729 > 2,75$). Dengan demikian, terbukti bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan sama-sama berdampak pada kualitas laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aksesibilitas laporan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan*

Abstract: *The purpose of this research is to find out how much the government's internal control system and the accessibility of financial statements affect the quality of financial reports at the East Nusa Tenggara Provincial Department of Industry and Trade. Methods This research uses a quantitative method with a causal associative approach. 95 employees became the population and the sample of this study involved 68 employees using the purposive sampling technique. Data was collected using a questionnaire. This research analyzes data using multiple linear regression where the results show that the results of the partial test have obtained a calculated T that is greater than the T value of the table ($X_1 = 2.639 > 1.996$, $X_2 = 2.243 > 1.996$), thus it is known that both the government's internal control system and the accessibility of financial statements affect the quality of financial statements individually. Furthermore, the F value calculated in the simultaneous test was greater than the F value of the table ($5.729 > 2.75$). Thus, it is proven that the government's internal control system and the accessibility of financial statements both have an impact on the quality of financial statements at the East Nusa Tenggara Provincial Industry and Trade Office*

Keywords: *Government Internal Control System, Accessibility of Financial Statements, Quality of Financial Statements*

PENDAHULUAN

Laporan finansial entitas berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban atas cara sumber daya keuangannya dikelola. Sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010, laporan finansial adalah informasi yang disusun secara sistematis tentang situasi dan transaksi keuangan suatu entitas. Laporan finansial merupakan perangkat untuk sebuah organisasi, dalam hal ini publik meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kinerja keuangannya (Ihyani et al., (2021). Selanjutnya menurut Palalangan, (2019) laporan finansial merupakan alat untuk sebuah organisasi dalam hal ini untuk menjawab kepada publik tentang kinerja keuangan pemerintah. Untuk membuat pilihan bisnis yang tepat, presper laporan keuangan harus dapat mengomunikasikan situasi keuangan perusahaan dengan cara yang dapat dimengerti dan terbuka, untuk mencegah kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan suatu organisasi.

Mengenai tanggung jawab dan keterbukaan akun keuangan negara bagian, kualitas laporan pemerintah sangat penting untuk diperiksa. Saat ini, terlepas dari elemen-elemen seperti struktur pengendalian internal pemerintah dan ketersediaan laporan keuangan, beberapa contoh menunjukkan betapa tidak memadainya pengawasan keuangan pemerintah negara

bagian dan kota. Sistem manajemen keuangan dan orang yang bertanggung jawab untuk mengawasinya sangat penting bagi setiap badan pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas laporan finansial, PP No. 71 Tahun 2010, revisi dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Dengan bantuan SAP, pemerintah pusat dan daerah dapat menangani perolehan dan pemanfaatan dana secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Akibatnya, sasaran meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan bisa dicapai secara efektif. Untuk membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD, harus menggunakan SAP. SAP adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk membuat dan mempresentasikan laporan finansial pemerintah (Nugraheni & Subaweh, (2008).

Sistem akuntansi mengatur sistem pengendalian internal, dan keakuratan faktor signifikan yang mempengaruhi pelaporan keuangan adalah seberapa baik sistem kontrol internal lembaga negara bagian bekerja (Aditya & Surjono, 2017). Sistem kontrol informasi pemerintah dapat digunakan oleh organisasi untuk menilai keakuratan laporan keuangannya. Memberikan konfirmasi yang cukup bahwa laporan finansial sudah dibuat secara wajar sebanding dengan peraturan perundang-

undangan yang relevan, prinsip akuntansi Indonesia, dan standar lainnya adalah tujuan pengendalian internal.

Pengendalian internal adalah Komponen kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian internal termasuk dari akuntansi pemerintah (Aziyah & Yanto, 2022). Legislator, birokrat, kelompok profesi, penyusun laporan keuangan, auditor internal dan eksternal, dan lain-lain menaruh nilai tinggi pada fungsi sistem pengendalian internal dalam organisasi pemerintahan. Kekhawatiran ditimbulkan oleh sejumlah kejadian yang melibatkan rusaknya sistem kontrol internal. Sistem kontrol internal yang memburuk menjadi alasan di balik meningkatnya kasus korupsi, penyalahgunaan dana publik, dan laporan keuangan di bawah standar. Lembaga pemerintah harus menyiapkan dan memelihara sistem kontrol internal yang efektif untuk meningkatkan nilai laporan finansial mereka. Empat kriteria harus dipenuhi agar laporan keuangan dianggap berkualitas tinggi: harus relevan, dapat dipercaya, sebanding, dan dapat dipahami (Armeli et al., 2017). Karakteristik relevan jika informasi yang disertakan memungkinkan pengguna untuk menilai keadaan terdahulu, saat ini, dan hari kemudian untuk membuat keputusan.

Laporan keuangan dikatakan andal jika informasinya jujur, dapat diversifikasi, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sementara kriteria dapat dibandingkan, khususnya apakah laporan keuangan sebanding dengan laporan finansial periode yang lalu atau perangkat pemberitahuan lainnya. Selanjutnya Kriteria dapat dipahami apakah isi informasi keuangan mudah dimengerti bagi pemakai dan apakah menyuguhkan dalam format dan bahasa yang sesuai dengan tingkat interpretasi pemakai. Keempat persyaratan ini harus dipenuhi oleh pemerintah saat menyajikan data laporan keuangannya untuk menjamin bahwa laporan keuangan memenuhi standar mutu yang dimaksudkan. Oleh karena itu, rekening keuangan pemerintah dianggap berkualitas tinggi. Upaya pembuatan kebijakan pemerintah di masa depan dapat memperoleh manfaat dari laporan keuangan berkualitas tinggi (Hasanah & Siregar, 2021) Dinas Perindustrian dan Perdagangan termasuk OPD yang berada dibawah kendali Pemerintah Provinsi NTT, Saat menyusun laporan keuangannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggunakan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, laporan finansial Dinas tersebut hanya mencantumkan catatan laporan keuangan, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran dan neraca. Arus kas yang tersisa dan perubahan saldo tidak dilaporkan. Akun-akun keuangan tersebut berkualitas buruk karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT gagal

mematuhi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai SAP secara keseluruhan. Tambahan pula catatan dari BPK terkait persoalan sistem kontrol internal masih tersedia, sesuai temuan audit laporan finansial yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT. Berikut ini adalah tabel data hasil temuan BPK terkait laporan keuangannya

**Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Provinsi NTT
T.A 2024**

No	Kelompok Temuan Pemeriksaan	Jumlah	Nilai
1	Terdapat bukti pertanggung jawaban yang belum dilakukan pengesahan oleh Kepala Dinas selaku pengguna Anggaran.	162 Buah bukti	Rp425.991.650
2	Biaya tertentu tidak didukung oleh dokumentasi yang komprehensif dan dapat diandalkan	38 Buah bukti	Rp57.568.675

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2024)

Saat menyajikan laporan keuangannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT tidak sepenuhnya mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.1. Kondisi ini melanggar PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yaitu Pasal 1 Nomor 1, Pasal 18 Ayat (1), dan Pasal 18 Ayat (3) Huruf H. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem kontrol

internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT masih di bawah standar

Berdasarkan masalah diatas, seharusnya sistem pengendalian internal harus lebih di tingkatkan lagi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT sehingga penyajian laporan keuangannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Menurut Defana & Rahayu (2023) Salah satu cara untuk menghentikan kecurangan adalah dengan membangun dan memperbaiki sistem pengendalian internal. Kemudian menurut Triono & Dewi (2020) SPIP yang kuat akan menjanjikan bahwa pengawasan finansial daerah dilaksanakan secara berkala dan sepadan dengan aturan, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian Kepala Dinas harus mempertimbangkan sistem pengawasan internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Selain itu untuk memperbaiki informasi keuangan pemerintah, pemerintah juga harus membuat informasi keuangannya yang mudah diakses publik. Menurut Yuliani (2017) untuk menjamin transparansi pemerintah, laporan keuangan harus mudah diakses Menurut Kurniati et al., (2024) kemudahan seseorang dapat menemukan informasi tentang laporan finansial dikenal sebagai aksesibilitas. Aksesibilitas laporan

keuangan mengacu pada betapa mudahnya seseorang memperoleh keterangan mengenai laporan finansial. Laporan finansial negara bagian pusat dan wilayah adalah hak publik. Inisiatif untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah akan gagal jika laporan keuangan diberikan tetapi tidak tersedia untuk masyarakat umum (Ichalina & Handayani, 2019).

Meskipun laporan keuangan hanya dirilis di dalam pemerintah, fakta sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah kurang terbuka untuk publik. Sebenarnya, masyarakat sangat penting untuk mengetahui otonomi daerah dan rilis laporan kinerja pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengenai neraca keuangan pemerintah pusat dan daerah tidak sepenuhnya menerapkan aksesibilitas rekening keuangan, seperti halnya dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT tidak menyediakan laporan keuangannya tersedia untuk umum, seperti online atau melalui media, sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk mendapatkan data keuangan mereka.

Berdasarkan permasalahan diatas Masyarakat berhak atas informasi tentang keuangan pemerintah karena mereka mempercayai pemerintah. Akibatnya, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat keputusan politik, ekonomi, dan

sosial yang menguntungkan semua pihak yang berkepentingan. Menurut Fauziyah & Handayani, (2017) sangat penting bagi pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangannya lebih dapat diakses publik selain menyampaikannya kepada DPRD. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa laporan finansial daerah memenuhi standar keterbukaan dan tanggungjawab. Menurut Sari et al., (2022) masyarakat berhak mendapatkan informasi keuangan dari pemerintah untuk ditinjau kinerja karena merupakan pihak yang memiliki kepercayaan kepadanya untuk menangani keuangannya. Jika aksesibilitas laporan keuangan pemerintah dioptimalkan, kualitas laporan keuangan pemerintah dapat ditingkatkan. Akibatnya, komponen kunci untuk meningkatkan kualitas rekening keuangan pemerintah adalah membuatnya lebih mudah diakses.

Menurut informasi latar belakang yang diberikan sebelumnya tentang masalah ini, dan teori yang ada, oleh karena itu, penelitian Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dilakukan peneliti.

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif kausal. Cara mengumpulkan data dengan

mengirimkan link kusioner melalui google form kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT. Terdapat 95 pegawai menjadi populasi dan banyaknya sampel yang dipilih sebanyak 68 pegawai dengan teknik *purposive sampling*. Adapun proses analisisnya difokuskan pada analisis linear berganda. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini:

Tabel 1.2 Defenisi Operasional

No	Variabel	Indikator
1	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1)	Unsur SPIP: 1. L. Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. K. Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Monitoring (Purba et al., 2021)
2	Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2)	1. Keterbukaan 2. Kemudahan akses laporan keuangan 3. Accessible (Sumiyati et al., 2015)
3	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (Armeli et al., 2017)

A. UJI INSTRUMEN

1. Uji Validitas

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Variabel SPIP(X1)

No.	Corrected-Total Correlation	Ket
1	.337	Valid
2	.394	
3	.592	
5	.494	
8	.386	

10	.605	Valid
11	.681	
12	.551	
13	.413	
14	.510	
15	.584	

Sumber: Data Olahan SPSS 21

Berdasarkan tabel 3.2 diatas terdapat 11 item pernyataan yang dinyatakan valid. Sehingga semua item pertanyaan ini dipakai peneliti dalam penelitian.

Tabel 1.4 Hasil Uji Validitas ALK (X2)

No.	Corrected-Total Correlation	Ket
2	.473	Valid
3	.492	
4	.450	
5	.559	
6	.651	
7	.542	
8	.369	
9	.517	

Sumber : Data Olahan SPSS 21

Berdasarkan tabel 1.4 diatas terdapat 8 item pernyataan yang dinyatakan valid. Sehingga semua item pertanyaan ini dipakai peneliti dalam penelitian.

Tabel 1. 5 Hasil Uji Validitas KLIK (Y)

No.	Corrected-Total Correlation	Ket
3	.436	Valid
4	.676	
5	.715	
7	.583	
8	.578	
9	.388	
10	.531	
11	.608	
12	.705	
13	.433	
14	.460	

Sumber : Data Olahan SPSS 21

Berdasarkan tabel 1. 5 diatas terdapat 11 item pernyataan yang dinyatakan valid. Sehingga semua item pertanyaan ini dipakai peneliti dalam penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 1.6 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbac'h Alpa	Ket
SPIP	.733	Reliabel
ALK	.629	Reliabel
KLK	.810	Reliabel

Sumber: Olahan SPSS 21

B. Uji Prasyarat Statistik

1. Uji Normalitas

Tabel 2.1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1,36791520
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.472
Asymp. Sig. (2-tailed)		.979
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Olahan SPSS 21

Bersumber dari tabel 2.1 terbukti bahwa residual data mengikuti distribusi normal dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah $0,979 > 0,05$.

2. Uji Linearitas

Tabel 2.2 Hasil Uji Linearitas X1

ANOVA Table						
			Sum of Squares	df	Mean Square	F Sig.
Kualitas Laporan Keuangan * Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Between Groups	(Combined)	29,574	8	3,697	1,850 ,086
		Linearity	12,396	1	12,396	6,204 ,016
		Deviation from Linearity	17,177	7	2,454	1,228 ,302
	Within Groups		117,897	59	1,998	
	Total		147,471	67		

Sumber: Olahan SPSS 21

Bersumber pada tabel tersebut, menampilkan bahwa variabel SPIP mempunyai nilai yang linear dengan nilai $0,302 > 0,05$.

Tabel 2.3 Hasil Uji Linearitas X2

ANOVA Table							
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kualitas Laporan Keuangan * Aksesibilitas Laporan Keuangan	Between Groups	(Combined)	27,379	10	2,738	1,299	,253
		Linearity	8,671	1	8,671	4,115	,047
		Deviation from Linearity	18,708	9	2,079	,987	,461
	Within Groups		120,092	57	2,107		
	Total		147,471	67			

Sumber: Olahan SPSS 21

Bersumber pada tabel tersebut, menampilkan bahwa variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan mempunyai nilai yang linear dengan nilai $0,461 > 0,05$.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.195	3,057	-.064	,949
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,020	,057	,044	,354
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,011	,050	,028	,822
	a. Dependent Variable: Abs_RES				

Sumber : Data Olahan SPSS 21

Sesuai dengan tabel diatas disimpulkan bahwa data berasal dari data sejenis atau homogen

4. Uji Multikolinearitas

Tabel 2.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	27,475	4,916	5,588	,000	
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,243	,092	,302	2,639	,010
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,181	,081	,257	2,243	,028
	a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan					

Sumber: Data Olahan SPSS 21

Bersumber pada tabel 2.5 terbukti bahwa tanda-tanda multikolinearitas tidak ada dengan nilai tolerans $0,998 > 0,10$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 3.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,475	4,916		5.588	,000
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,243	,092	,302	2.639	,010
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,181	,081	,257	2.243	,028
	a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan					

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan SPSS 21

Didapatkan rumus persamaan regresi ($Y=27.475+ 0.243+0.181$) nilai konstanta 27.475, konstanta variabel SPIP 0.243 dan variabel Aksesibilitas Laporan keuangan 0.181

2. Uji Hipotesis

a. Uji T

Tabel 3.2 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,475	4,916		5,588	,000
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,243	,092	,302	2,639	,010
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	,181	,081	,257	2,243	,028
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data Olahan SPSS 21

Hasil uji table 3.2 membuktikan t_{hitung} untuk variabel SPIP sebesar $2.639 > t_{tabel} 1,996$ dan signifikansinya $0,010 < 0,05$, sedangkan variabel aksesibilitas laporan keuangan menunjukkan nilai $t_{hitung} 2.243 > t_{tabel} 1,996$ dan signifikansinya $0,028 < 0,05$.

b. Uji F

Tabel 3.3 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.101	2	11,050	5,729	,005 ^b
	Residual	125.370	65	1,929		
	Total	147.471	67			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						
Sumber: Olahan Data SPSS 21						

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sumber: Olahan Data SPSS 21

Hasil: Olahan SPSS 21

Data tabel 13 bisa dilihat F_{hitung} yang diperoleh $5,729 > F_{tabel} 2,75$, selanjutnya signifikansinya $0,005 < 0,05$.

c. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,387 ^a	,150	,124	1,389

a. Predictors: (Constant), Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sumber: Data Olahan SPSS 21

Data table 3.4 menunjukkan faktor kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel SPIP dan aksesibilitas laporan keuangan sebesar 15%. Sementara itu 85% berasal dari faktor lain.

Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Setelah melakukan perhitungan data, didapat informasi yakni variabel X1 memiliki dampak yang kuat dan menguntungkan pada variabel Y. Ini dibuktikan lewat hasil uji t, $t_{hitung} = 2,639$ melebihi $t_{tabel} 1,996$, kemudian signifikansinya $0,010 (0,010 < 0,05)$. Dengan demikian kualitas laporan finansial

mempunyai dampak yang signifikan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah, sehingga H_1 diterima. Adapun pengaruh yang diberikan bersifat positif.

Dapat diartikan semakin optimal sistem kontrol internal dilakukan, oleh karena itu nilai laporan finansial dapat ditingkatkan. Dengan menggunakan sistem kontrol yang lebih baik, kelalaian dalam pengerjaan dan penyampaian laporan finansial dapat dihindari. Menurut Mene et al., (2018) sistem kontrol internal yang efisien akan diterapkan untuk menjaga entitas dari kesenjangan manusia dan meminimalkan kesalahan atau kekeliruan, memastikan bahwa data yang dibuat dalam laporan finansial memenuhi persyaratan kualitas laporan finansial dan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini yang dilakukan oleh Firmansyah & Sinambela, (2020) yang menjelaskan bagaimana sistem pengendalian internal sangat memengaruhi kualitas laporan finansial. Hal ini konsisten dengan studi oleh Novita et al., (2023). studinya mengatakan bahwa sistem kontrol internal membantu meningkatkan laporan finansial pemerintah. Pengaruhnya ditunjukkan melalui nilai F_{hitung} 52,297 dan signifikansi yang didapatkan $0,000 < 0,05$.

2. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hitungan analisis data diperoleh informasi bahwa variabel X_2 berpengaruh 0,181 dengan tingkat signifikansi 0,028. Hal ini dinyatakan hasil uji t didapat t_{hitung} 2,243 lebih tinggi dari t_{tabel} 1,996, kemudian signifikansinya $0,028 < 0,05$. Artinya kualitas laporan keuangan secara signifikan dipengaruhi oleh aksesibilitasnya, sehingga H_2 diterima. Adapun pengaruh yang diberikan bersifat positif, dapat diartikan bahwa Laporan keuangan yang lebih mudah diakses, semakin baik kualitasnya.

Menurut Fikrian et al., (2017) semakin mudah diakses laporan keuangan, maka manajemen keuangan akan semakin akuntabel. Artinya apabila pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas laporan keuangannya maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

Penelitian sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini yang dilakukan oleh Hadijah, (2017) hasil penelitiannya menekankan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berdampak signifikan pada kualitas laporan finansial. Pengaruhnya ditunjukkan melalui nilai t_{hitung} 4.164 $> t_{tabel}$ 1.673.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Sama-Sama Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari analisis data diperoleh nilai F_{hitung} 5,729 dan signifikansinya sebesar $0,005 < 0,05$, sedangkan F_{tabel} sebesar 2,75, hal ini berarti $F_{hitung} 5,729 > F_{tabel} 2,75$. Artinya bahwa variabel X memberikan dampak positif pada variabel Y sehingga H_3 diterima.

Hal ini berarti kualitas laporan finansial dapat ditingkatkan jika kontrol internal dan aksesibilitas laporan finansial dioptimalkan. Argumen tersebut serupa dengan pendapat Maulani et al., (2024) yang mengatakan karena SPI menciptakan lingkungan kontrol yang menguntungkan, hal itu dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan. Tak hanya itu Hadijah, (2017) juga yang mengatakan unit kerja harus dapat dengan cepat memberikan informasi keuangan kepada mereka yang memerlukan, baik di dalam atau di luar, di era teknologi yang semakin nyaman ini. Akibatnya, laporan keuangan akan lebih berkualitas jika aksesibilitasnya telah dimaksimalkan.

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh 0.150 atau 15% menunjukkan besarnya pengaruh dari kedua variabel ini yaitu sebesar 15%. Sedangkan 85% berasal dari faktor tambahan yang bukan tercakup dalam studi ini.

KESIMPULAN

Sesuai dengan data yang sudah dianalisis dan dibahas pada bagian atas maka kesimpulan yang diperoleh yaitu:

1. Dibuktikan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh SPIP.
2. Dibuktikan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh aksesibilitasnya.
3. Kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh SPIP dan aksesibilitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, O. R., & Surjono Welly. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Sikap*, 2(1), 49–62. <https://doi.org/10.36418/jcs.v1i3.66>
- Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi sumber Daya manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *JOM Fekon*, 4(1), 105–119. <https://doi.org/10.33369/Fekon.v8i2.15203>
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 977–989. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686>

- Defana, F. A., & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021). *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 21–30.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v1i1.2681>
- Fauziyah, M. R., & Handayani Nur. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(6), 1–16.
<https://doi.org/10.70178/icbrj.v1i2.19>
- Fikrian, H., Hasan, A., & A, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4(1), 265–279.
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Land Journal*, 1(1), 1–11.
<https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i1.557>
- Hadijah, S. (2017). Pengaruh System Komputerisasi Akuntansi , Kompetensi Sdm Bidang Akuntansi , Aksesibilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. *Jurnal Ilmiah Tarbiyah Umat*, 7(1), 77–88.
- Hasanah, S., & Siregar, T. R. S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi Keuangan & Perpajakan Indonesia (JAKPI)*, 9(1), 39–47.
<https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.90>
- Ichalina, F., & Handayani, N. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(5), 1–16.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1886/1888>
- Ihyani, L., Handajani, L., & Pituringsih, E. (2021). Pengaruh SAP dan SPI terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Refocusing dan Realokasi Anggaran sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas SAM Ratulangi(JMBI UNSRAT)*, 8(3), 793–805.
<https://doi.org/10.52490/attijarah.v3i2.145>
- Kurniati, Sylvia, & Abdullah. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keunagan, dan kualitas Laporan Keunagan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Maros. *Gendhera Buana Jurnal*, 2(1), 15–29.
<https://doi.org/https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/gbj>
- Maulani, F., Asmeri, R., & Meriyani. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Motivasi Kerja, dan Aksesibilitas Pelaporan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Fadhillah. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 2(2), 143–150.
- Mene, R. E., Karamoy, H., & Warongan, J. D. . (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 133–143. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20045.2018>
- Novita, Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa pada Tingkat Kecamatan Palue. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(5), 294–315. <https://doi.org/10.59581/jmk-widyakarya.v1i5.1243>
- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(1), 48–58.
- Palalangan, C. A. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamasa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 120–138. <https://doi.org/http://journal.undikna.s.ac.id/index.php/akuntansi>
- Purba, S., Nainggolan, A., & Tarigan, S. Y. B. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(2), 113–120. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i2.136>
- Sari, N., Dasila, R. A., & Sari, T. (2022). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada SKPD Kota Palopo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 860–872. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.4065>
- Sumiyati, Zulbahridar, & Safitri, D. (2015). Pengaruh penyajian Laporan Keuangan daerah dan Aksesibilitas Laporan Daerah Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.
- Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 213–220.
- Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 1–14.